



LAPORAN PELAKSANAAN

PELAYANAN INFORMASI DAN DATA

*INGIN TAHU WAKIL
ANDA DI DPRD
KABUPATEN BANDUNG
.....?*



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2015

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN BANDUNG

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialny aserta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, oleh karena itu dalam rangka mengoptimalkan pengawasan publik khususnya dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Bandung, KPU Kabupaten Bandung mempunyai kewajiban menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana serta pengecualian bersifat ketat dan terbatas melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Bandung.

Salah satu tugas PPID menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut perlu menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID KPU Kabupaten Bandung, dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN BANDUNG

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

Adapun standar pelayanan informasi publik, sbb :

1. Operasional Pelayanan Informasi PublikKPU Kabupaten Bandung

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, PPID KPU Kabupaten Bandung didukung oleh Front Office dan Back Office antara lain :

a. Front Office / Media Center

- 1) Desk layanan langsung
 - 2) Desk layanan media (telepon, email dan website)
- b. Back Office
- 1) Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
 - 2) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
 - 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip
 - 4) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi.

2. Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Bandung yang dilaksanakan pada hari kerja senin sampai dengan jumat sebagai berikut

Senin s/d	:	09.00 s/d 5.00 WIB
Kamis	:	
Istirahat	:	12.00 s/d 13.00 WIB
Jumat	:	09.00 s/d 15.00 WIB
Istirahat	:	11.00 s/d 13.00 WIB

3. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

- a. Pemohon informasi datang ke layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna informasi.
- b. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
- c. Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
- d. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik
- f. Membukukan dan mencatat.

4. Jangka Waktu Penyelesaian

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak diterima pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada diminta penguasanya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja.
- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik dilakukan secara langsung , melalui email ,fax atau jasa pos .
- d. Jika permohonan informasi diterima maka di surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila diperlukan untuk keperluan pengadaan atau perekaman, bila permintaan informasi ditolak maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan surat penolakan berdasarkan UU KIP.

5. Biaya Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar kantor KPU Kabupaten Bandung atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

6. Kompetensi Pelaksana Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh PPID Pembantu /Bidang yang berasal dari Sub Bagian dilingkungan KPU Kabupaten Bandung.

7. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik dan laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan dan dilaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bandung selaku atasan PPID KPU Kabupaten Bandung. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi ,tindak lanjut dari permintaan yang belum

dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dari waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU KIP.
- b. Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- c. Tidak ditanggapi permintaan informasi.
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta.
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN BANDUNG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	RETENSI ARSIP
1	Kegiatan Pilbup 2015					
	a. Rekap Jumlah Pemilih	KPU Kab. Bandung	Subbag Teknis	Oktober 2015	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	b. Rekap Jumlah TPS	s.d.a	Subbag Teknis	Oktober 2015	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	c. Perolehan Suara Calon dan Calon Terpilih	s.d.a	Subbag Teknis	Desember 2015	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	d. Partisipasi Pemilih	s.d.a	Subbag Teknis	Desember 2015	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
2	Kegiatan Pilpres 2014					
	a. Rekap Jumlah Pemilih	KPU Kab. Bandung	Subbag Teknis	Oktober 2014	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	b. Rekap Jumlah TPS	s.d.a	Subbag Teknis	Oktober 2014	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	c. Perolehan Suara Calon dan Calon Terpilih	s.d.a	Subbag Teknis	Oktober 2014	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	d. Partisipasi Pemilih	s.d.a	Subbag Teknis	Oktober 2014	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	f. Daerah Pemilihan	s.d.a	Subbag Teknis	Oktober 2014	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
2	Kegiatan Pileg 2014					
	a. Rekap Jumlah Pemilih	KPU Kab. Bandung	Subbag Teknis	Agustus 2014	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	b. Rekap Jumlah TPS	s.d.a	Subbag Teknis	Agustus 2014	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	c. Daftar Calon Anggota DPRD	s.d.a	Subbag Teknis	Agustus 2014	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen

	d. Perolehan Suara dan Daftar Calon Terpilih	s.d.a	Subbag Teknis	Agustus 2014	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	e. Partisipasi Pemilih	s.d.a	Subbag Teknis	Agustus 2014	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	f. Daerah Pemilihan	s.d.a	Subbag Teknis	Agustus 2014	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
	g. Laporan Dana Kampanye	s.d.a	Subbag Hukum		Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
3	Kegiatan Pilgub 2013					
	a. Rekap Jumlah Pemilih	KPU Kab. Bandung	Subbag Teknis	Mei 2013	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	b. Rekap Jumlah TPS	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2013	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	c. Perolehan Suara Calon dan Calon Terpilih	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2013	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	d. Partisipasi Pemilih	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2013	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	e. Mitra Sosialisasi	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2013	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	f. Daerah Pemilihan	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2013	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
4	Kegiatan Pilbup 2010					
	a. Rekap Jumlah Pemilih	KPU Kab. Bandung	Subbag Teknis	Nopember 2010	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	b. Rekap Jumlah TPS	s.d.a	Subbag Teknis	Nopember 2010	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	c. Perolehan Suara Calon dan Calon Terpilih	s.d.a	Subbag Teknis	Nopember 2010	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	d. Partisipasi Pemilih	s.d.a	Subbag Teknis	Nopember 2010	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	e. Daerah Pemilihan	s.d.a	Subbag Teknis	Nopember 2010	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku

	f. Laporan Dana Kampanye	s.d.a	Subbag Hukum	Nopember 2010	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
5	Kegiatan Pilpres 2009					
	a. Rekap Jumlah Pemilih	KPU Kab. Bandung	Subbag Teknis	Agustus 2009	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	b. Rekap Jumlah TPS	s.d.a	Subbag Teknis	Agustus 2009	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	c. Perolehan Suara Calon dan Calon Terpilih	s.d.a	Subbag Teknis	Agustus 2009	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	d. Partisipasi Pemilih	s.d.a	Subbag Teknis	Agustus 2009	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	e. Daerah Pemilihan	s.d.a	Subbag Teknis	Agustus 2009	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
6	Kegiatan Pileg 2009					
	a. Rekap Jumlah Pemilih	KPU Kab. Bandung	Subbag Teknis	Mei 2009	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	b. Rekap Jumlah TPS	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2009	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	c. Daftar Calon Anggota DPRD	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2009	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	d. Perolehan Suara dan Daftar Calon Terpilih	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2009	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	e. Perolehan Kursi Partai Politik	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2009	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	f. Partisipasi Pemilih	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2009	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	g. Daerah Pemilihan	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2009	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
	h. Laporan Dana Kampanye	s.d.a	Subbag Hukum	Mei 2009	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	i. PAW anggota Legislatif	s.d.a	Subbag Program	2009 s/d Agustus 2014	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen

7	Kegiatan Pilgub 2008					
	a. Rekap Jumlah Pemilih	KPU Kab. Bandung	Subbag Teknis	Mei 2008	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	b. Rekap Jumlah TPS	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2008	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	c. Perolehan Suara Calon dan Calon Terpilih	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2008	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	d. Partisipasi Pemilih	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2008	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	e. Daerah Pemilihan	s.d.a	Subbag Teknis	Mei 2008	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
8	Kegiatan Pilbup 2005					
	a. Rekap Jumlah Pemilih	KPU Kab. Bandung	Subbag Teknis	November 2005	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	b. Rekap Jumlah TPS	s.d.a	Subbag Teknis	November 2005	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	c. Perolehan Suara Calon dan Calon Terpilih	s.d.a	Subbag Teknis	November 2005	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	d. Partisipasi Pemilih	s.d.a	Subbag Teknis	November 2005	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	e. Daerah Pemilihan	s.d.a	Subbag Teknis	November 2005	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku
9	Kegiatan Pilpres 2004					
	a. Rekap Jumlah Pemilih	KPU Kab. Bandung	Subbag Teknis	Juli 2004	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	b. Rekap Jumlah TPS	s.d.a	Subbag Teknis	Juli 2004	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun
	c. Perolehan Suara Calon dan Calon Terpilih	s.d.a	Subbag Teknis	Juli 2004	Softcopy dan Hardcopy	3 Tahun/Permanen
	d. Partisipasi Pemilih	s.d.a	Subbag Teknis	Juli 2004	Softcopy dan	3 Tahun

DAFTAR RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DATA TAHUN 2015

NO	NOMOR FORMULIR	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	TINDAK LANJUT
1	No.01/PPI/KPU - Bandungkab/PI /IV/15	16/04/2015	Risfan Fardiansyah	Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah	Langsung/soft copy
2	No.02/PPI/KPU - Bandungkab/PI /IV/15	22/04/2015	Dr.Drs.A.Widanarto ,M.Si	Data Pemilih Pilpres 2014	Langsung/soft copy
3	No.03/PPI/KPU - Bandungkab/PI /IV/15	24/04/2015	Deky Hisyanto	Tahapan Pilkada	Langsung/soft copy
4	No.04/PPI/KPU - Bandungkab/PI /V/15	25/05/2015	Ronny Chairul Anwar	Data Pemilih	Langsung/soft copy
5	No.05/PPI/KPU - Bandungkab/PI /VIII/15	06/08/2015	Edi Supriadi	Peraihan Suara	Langsung/soft copy
	No.06/PPI/KPU - Bandungkab/PI /VIII/15	20/08/2015	LBH PDI perjuangan	Data B1-KWK Perseorangan	Konsultasi ke KPU Prov Jabar dan KPU RI/tidak diberikan
6	No.07/PPI/KPU - Bandungkab/PI /VIII/15	24/08/2015	Yana Sumarna	Hasil Perhitungan Pilgub 2010	Langsung/soft copy
7	No.07a/PPI/KPU - Bandungkab/PI /VIII/15	24/08/2015	Mildan Abdalloh	Jadwal Kampanye	Langsung/soft copy
8	No.08/PPI/KPU - Bandungkab/PI /IX/15	06/09/2015	Johan Syahrizal	Jadwal Kampanye	Langsung/soft copy
9	No.09/PPI/KPU - Bandungkab/PI /VIII/15	26/08/2015	Reo H	Jadwal Tahapan & Kampanye Berita Acara Pasangan Calon	Langsung/soft copy

10	No.08/PPI/KPU - Bandungkab/PI /VIII/15	28/08/2015	Andy Andrewo M	Data-data Pilkada Kab.Bandung	Langsung/soft copy
11	No.10/PPI/KPU - Bandungkab/PI /IX/15	02/09/2015	Pratama Johan	DPS Kab.Bandung	Langsung/soft copy
12	No.11/PPI/KPU - Bandungkab/PI /IX/15	14/09/2015	M Kusmayati		Langsung/soft copy
13	No.12/PPI/KPU - Bandungkab/PI /IX/15	17/09/2015	J Arnould	Data Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil	Langsung/soft copy
14	No.13/PPI/KPU - Bandungkab/PI /IX/15	23/09/2015	H.dede Priyatna	Daftar Tim Kampanye	Langsung/soft copy
15	No.14/PPI/KPU - Bandungkab/PI /IX/15	23/09/2015	Budi	Tim Sukses	Langsung/soft copy
16	No.15/PPI/KPU - Bandungkab/PI /X/15	08/10/2015	Rudhiawan,S.Ip.	Dokumentasi Tahapan Pilkada 2015	Langsung/soft copy
17	No.16/PPI/KPU - Bandungkab/PI /X/15	12/10/2015	Eman SIP.	Nama-nama Calon Pemilih,Jumlah Daftar Pemilih dan Kampanye dari Tgl s/d Tgl - Berapa Kec,Desa,TPS - Rencana Pemilihannya Tgl - Pelantikan	Langsung/soft copy
18	No.17/PPI/KPU - Bandungkab/PI /X/15	16/10/2015	Dadang Setiawan, SE	DPT	Langsung/soft copy
19	No.18/PPI/KPU - Bandungkab/PI /X./15	16/10/2015	Rahmat Ropian Noor	Tahapan Pilkada	Langsung/soft copy
20	No.19/PPI/KPU - Bandungkab/PI /X/15	16/10/2015	Subhan	Data Hasil Pileg 2014 Khusus DPRD Kab dan Partai	Langsung/soft copy
21	No.20/PPI/KPU -	24/11/2015	Masdi Adiweijaya,S.Pd.	Jadwal Kampanye Kab.Bandung Tahun 2015	Langsung/soft copy

	Bandungkab/PI /XI/15				
22	No.21/PPI/KPU - Bandungkab/PI /XI/15	24/11/2015	Bagus	Data Persiapan PILKADA	Langsung/soft copy
23	No.22/PPI/KPU - Bandungkab/PI /XI/15	24/11/2015	Novi Yanto	Data Pemilu/Data Pasangan Calon dan Partai Perorangan sama IdependeN	Langsung/soft copy
24	No.23/PPI/KPU - Bandungkab/PI /XII/15	02/12/2015	Ichwanul Muslim Karo-Karo	Data File DPT PILKADA Kab.Bandung dan Rekapitulasi TPS Se-Kab.Bandung	Langsung/soft copy
25	No.24./PPI/KPU - Bandungkab/PI /XII/15	04/12/2015	Andri Muhamad Sentanu	Data Golput, HIBAH dari PEMDA ke KPU, Penetapan Pemilih Pemula dari DPU, DRS, dan DPT KPU Hasil Pemilu 2014 dan Mengenai Bupati	Langsung/soft copy
26	No.25/PPI/KPU - Bandungkab/PI /XII/15	29/12/2015	Ikhmaludin Sepyar	-1. Data yg Memiliki hak pilihan pilkada (Ds.Pasawahan,Kec. Dayeuhkolot) -2. Data Hasil Pilkada 2015 -3. Data Suara yg Tidak Syah -4. Struktur Organisasi -5. Tugas-Tugas KPUK Ketika PILKADA -6.D291k Bentuk Sosialisasi KPUK Mengenaim Pilkada Kemarin	Langsung/soft copy

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
KETUA

ATIP TARTIANA, S.I.P

D. SENGKETA INFORMASI

Adapun sengketa informasi yang terjadi antara KPU Kabupaten Bandung dengan LBH PDI Perjuangan mengenai permintaan data dukungan calon perseorangan (B1-KWK perseorangan), KPU Kabupaten Bandung merasa perlu untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI apakah data B1-KWK Perseorangan adalah data yang bisa di berikan ke publik atau termasuk data yang dikecualikan.

Dan dari hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU RI bahwa data B1-KWK Perseorangan merupakan data yang di kecualikan, dan berdasarkan surat keputusan KPU RI Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka KPU Kabupaten Bandung menolak untuk memberikan data B1-KWK perseorangan tersebut.

Berikut kronologis sengketa informasi di Komisi Informasi Jawa Barat :

Nomor Registrasi	:	1193/K-F2/PSI/KI-JBR/IX/2015	
Pemohon	:	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PDI Perjuangan Kabupaten Bandung	
Alamat	:	Jl. Jaksa Naranata No.10 Kabupaten Bandung	
Termohon	:	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung	
Alamat	:	Jl. Raya Taman Kopo Indah Blok. F Margahayu Jawa Barat 40191	
Informasi yang dimohonkan	:	Copy dokumen Lampiran Model B1-KWK Perseorangan	
Alasan Pengajuan Sengketa	:	Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon	
Tujuan	:	Kepentingan Investigasi lebih lanjut agar PDIP Kabupaten Bandung bisa mengidentifikasi kader-kader partainya yang diduga tandatangannya dan dukungannya dipalsukan	
1.	20 Agustus 2015	:	Pemohon mengirimkan Surat Permintaan Informasi Publik kepada Ketua KPU Kabupaten Bandung tertanggal 20 Agustus 2015 dan diterima tanggal 20 Agustus 2015
2.	21 Agustus 2015	:	Termohon mengirimkan surat Permohonan Arahan dan Penjelasan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dengan nomor surat 146/KPU.Kab.011.329047/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015

3.	21 Agustus 2015	:	Termohon mengirimkan Surat Jawaban atas Surat LBH PDI Perjuangan Kabupaten Bandung dengan nomor surat 147/KPU.Kab.011.329047/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015. Tembusan kepada Bapak Ketua KPU RI
4.	22 Agustus 2015	:	Pemohon mengirimkan surat Keberatan kepada Ketua KPU Kabupaten Bandung tertanggal dengan nomor istimewa tertanggal 22 Agustus 2015
5.	26 Agustus 2015	:	Termohon menerima surat tentang klasifikasi informasi model B.1-KWK perseorangan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dengan nomor surat 907/KPU-Prov.011/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015
6.	26 Agustus 2015	:	Termohon mengirimkan jawaban keberatan kepada Ketua Tim Advokasi PDI Perjuangan Kabupaten Bandung dengan nomor surat 153/KPU.Kab.011.329047/VII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015. Surat tersebut disampaikan kepada LBH PDI Perjuangan Kabupaten Bandung melalui Ibu Anna Hasanah Bendahara Duriat Bandung (Paslon Bupati dan Wk Bupati Bandung Tahun 2015 atas nama Deki dan Dony yang diusung gabungan Parpol PDI Perjuangan Kabupaten Bandung dan Partai Demokrat Kabupaten Bandung). Selanjutnya Ibu Anna Hasanah menyampaikan surat tersebut kepada Ryan Yan Yan Hendrayana selaku LO Paslon Duriat Bandung. Sore hari tanggal 26 Agustus 2015 Ryan menyampaikan surat tersebut kepada Ketua Tim Advokasi LBH PDI Perjuangan Kabupaten Bandung
7.	27 Agustus 2015	:	Pemohon mengirimkan tembusan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Bandung tentang permohonan sengketa informasi kepada Ketua Komisi Informasi Jawa Barat dengan nomor istimewa tertanggal 27 Agustus 2015
8.	28 Agustus 2015	:	Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
9.	28 Agustus 2015	:	Komisi Informasi menerima berkas Pengajuan Sengketa Informasi Publik dari LBH PDI Perjuangan Kabupaten Bandung
10.	1 September 2015	:	Komisi Informasi Jawa Barat mengirimkan Surat Ketidaklengkapan Dokumen (SKTL) dengan nomor

			TL537/SKTL/PSI/IX/2015 tertanggal 1 September 2015 kepada Termohon
11.	4 September 2015	:	Komisi Informasi Jawa Barat mencatat dan meregister permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan nomor 1193/K-F2/PSI/KI-JBR/IX/2015 dengan AKTA Registrasi nomor 758/REG-PSI/IX/2015.
12.	4 September 2015	:	Termohon menerima surat panggilan sidang pemeriksaan awal dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui e-mail kpubandungkab@gmail.com dengan Nomor surat 592/PA/PSI/KI-JBR/IX/2015 tertanggal 4 September 2015.
13.	9 September 2015	:	Termohon menerima surat dari Agus Rustandi Komisioner Provinsi Jawa Barat tentang Surat Edaran dari Ketua KPU Bpk Husni Kamil Malik nomor 564/KPU/IX/2015 perihal klasifikasi informasi model B.1-KWK Perseorangan tertanggal 4 September 2015 termasuk Informasi Yang Dikecualikan
14.	11 September 2015	:	Termohon menerima surat panggilan sidang Ajudikasi Pembuktian pada hari Kamis 17 September 2015 Pukul 13.00 WIB s.d. 14.00 WIB dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 600/SAP/PSI/KI-JBR/IX/2015 tertanggal 10 September 2015
15.	18 September 2015	:	Termohon menerima surat Jawaban pada hari Senin 21 September 2015 dari KPU Provinsi Jabar nomor 955/KPU-Prov-011/IX/2015
16.	18 September 2015	:	Termohon mengajukan surat permohonan dokumen uji hasil uji konsekuensi ke KPU RI melalui PPID KPU RI nomor 183/KPU.Kab.011.329047/IX/2015
17.	22 September 2015	:	Termohon menerima surat sidang pemeriksaan setempat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui e-mail yuda_ningsihyahoo.com dengan Nomor surat Und.621/PS/PSI/KI-JBR/IX/2015 tertanggal 18 September 2015.
18.	23 September 2015	:	Termohon menerima Pimpinan Sidang KI Jabar beserta anggota KI Jabar di Aula KPU Kabupaten Bandung untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat
19.	6 Oktober 2015	:	Termohon menerima surat panggilan sidang Ajudikasi Pembuktian 2 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan Nomor surat 655/SAP/PSI/KI-JBR/X/2015 tertanggal 5 Oktober 2015.

20.	6 Oktober 2015	:	Termohon menerima SK dari KPU RI dengan Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
21.	23 Oktober 2015	:	Termohon menerima surat pengantar putusan berikut Putusan Nomor 542/PTSN-MK.MA/KI-JBR/X/2015 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
22.	26 Oktober 2015	:	Termohon membuat Berita Acara No.70.A/BA/X/2015 tentang Permohonan arahan dari KPU Provinsi Jawa Barat terkait tindak lanjut pelaksanaan putusan KI Jabar
23.	27 Oktober 2015	:	Termohon mengajukan surat Permohonan Arahan kepada Ketua KPU Jabar dengan nomor 251/KPU.Kab.011.329047/X/2015 tertanggal 27 Oktober 2015, tembusan kepada Ketua KPU RI
24.	5 November 2015	:	Termohon membuat Berita Acara No.76/BA/XI/2015 tentang tindak lanjut Putusan Nomor 542/PTSN-MK.MA/KI-JBR/X/2015 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
25.	5 November 2015	:	Termohon sulit menemukan dan memastikan 5 nama yang sesuai sesuai dengan putusan KI maka selanjutnya Termohon mengajukan surat kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang tindak lanjut Putusan Komisi Informasi dengan nomor surat 266.a/KPU.Kab.011.329047/XI/2015 tertanggal 5 November 2015
26.	18 November 2015	:	Termohon menerima surat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat perihal Tindak Lanjut putusan Komisi Informasi berikut lampiran berkas dokumen terkait nama-nama yang harus diperlihatkan kepada Pemohon dengan nomor surat 046/KTA/XI/2015 tertanggal 13 November 2015
27.	25 November 2015	:	Termohon melakukan verifikasi tindak lanjut atas putusan Komisi Informasi Jabar dengan nomor Berita Acara 85/BA/XI/2015
28.	26 November 2015	:	Termohon melakukan verifikasi tindak lanjut atas putusan Komisi Informasi Jabar dengan nomor Berita Acara 86/BA/XI/2015
29.	30 November 2015	:	Termohon mengundang Ketua LBH PDIP Kabupaten Bandung untuk menghadiri pelaksanaan putusan KI Jabar dengan nomor surat 331/UND/XI/2015 tertanggal 30 November 2015
30.	2 Desember 2015	:	Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan Komisi Informasi Jabar. LBH PDIP membuat catatan belum bisa menerima Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan Komisi Informasi Jabar
31.	16 Desember 2015	:	Termohon menerima surat dari LBH PDIP Kabupaten Bandung tentang Permohonan Legalisir Dokumen dengan nomor surat 020/S-K/LBH-PDIP/XII/2013 tertanggal 14 Desember 2015
32.	17 Desember 2015	:	Termohon konsultasi melalui telepon dengan Pak Endun

			Abdul Haq selaku Komisioner KPU Jabar tentang permohonan legalisir dokumen dari LBH PDIP Kabupaten Bandung. Pak Endun mengatakan bahwa KPU Kabupaten Bandung tidak boleh melegalisir dokumen yang tidak dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bandung. Beliau jugamenyarankan agar mengajukan surat tertulis arahan kepada KPU Jabar
33.	17 Desember 2015	:	Termohon memberikan jawaban Permohonan Legalisir Dokumen dengan nomor surat 378 /KPU.Kab.011.329047/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015
34.	17 Desember 2015	:	Termohon mengajukan surat permohonan arahan kepada KPU Provinsi Jawa Barat dengan nomor surat 380/KPU.Kab.011.329047/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Kendala Internal

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Bandung terkendala dari kurang berjalannya struktur dari pelaksanaan pelayanan informasi, hal ini disebabkan dengan terbenturnya antara tugas-tugas rutin yang dilaksanakan dengan jobdesk dari pelayanan informasi itu sendiri. Selain itu KPU Kabupaten Bandung terkendala dari data-data yang belum tersusun rapih dikarenakan data-data dalam pelaksanaan Pemilu yang dilaksanan dibawah tahun 2010 hanya terdapat data Hardcopy sedangkan data-data softcopy sebagian besar hilang dikarenakan rusaknya beberapa backup hardisk.

b. Kendala Eksternal

KPU Kabupaten Bandung merasa perlu memperoleh data terperinci dari PPID KPU RI mengenai informasi yang termasuk kedalam kategori dikecualikan hal ini disebabkan PPID KPU Kabupaten/Kota tidak bisa membuat keputusan langsung apakah data tersebut informasi yang dikecualikan atau tidak karena KPU Kabupaten/Kota harus mempunyai keseragaman persepsi.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKAT KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dalam hal ini KPU Kabupaten Bandung merasa perlu untuk merekomendasikan kepada PPID KPU RI untuk mengklasifikasikan data mengenai informasi yang termasuk kedalam kategori dikecualikan atau tidak,